

IDENTIFIKASI PEMANFAATAN RUANG TERBANGUN DI WILAYAH PESISIR SEPANJANG PANTAI PADANG BAGIAN BARAT, KECAMATAN PADANG BARAT, KECAMATAN PADANG UTARA

A.A.Prastyo¹⁾, dan T.SUHERI²⁾

^{1,2} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No. 102-116 Bandung 40132
Email : alit.ajiprastyo@gmail.com¹⁾, tatangpl@yahoo.com²⁾

ABSTRAK

Pemanfaatan ruang terbangun terjadi karena aktivitas manusia yang menimbulkan daya tarik sehingga memunculkan aktivitas-aktivitas baru dalam memanfaatkan ruang. Wilayah pesisir memiliki potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, maupun kawasan pariwisata. Karena tingginya potensi tersebut maka perlu adanya perlakuan khusus dalam pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Padang saat ini antara lain yaitu permukiman yang sangat dekat dengan laut, dan permasalahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang terbangun yang ada di wilayah pesisir dengan melihat proporsi pemanfaatan ruang terbangun di wilayah pesisir pantai Padang bagian barat serta aktivitas didalamnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif, overlay peta, persepsi masyarakat dengan metode Skala Likert. Data primer diambil melalui kuisioner dengan 100 responden, data sekunder berasal dari instansi terkait dan studi literatur. Berdasarkan tinjauan kebijakan yaitu RTRW, RDTR, dan RPJMD wilayah pesisir pantai padang bagian barat diarahkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan pariwisata. Artinya pemanfaatan ruang terbangun di wilayah pesisir pantai padang bagian barat berorientasi kepada peningkatan perekonomian. Proporsi pemanfaatan ruang terbangun saat ini didominasi oleh kawasan permukiman kepadatan sedang yaitu 46,4%, kawasan perdagangan dan jasa 24,9%, kawasan permukiman kepadatan tinggi 12,3%. Pemanfaatan ruang terbangun juga dilihat dari persepsi masyarakat terkait prasarana dan sarana yang ada di wilayah studi. Diperoleh hasil persepsi masyarakat yaitu kondisi drainase 32,75% (Cukup), kondisi sarana angkutan umum 66,25% (Baik), Kondisi Limbah 31,25% (Cukup).

Kata Kunci : Pemanfaatan Ruang Terbangun, Pengendalian, Persepsi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Ruang merupakan tempat aktifitas manusia yang saling terintegrasi. Ruang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga adanya perlakuan yang berbeda-beda terhadap Ruang. Wilayah pesisir memiliki potensi yang sangat besar di berbagai aspek diantaranya aspek lingkungan, sosial, ekonomi. Sumberdaya pesisir dan lautan merupakan potensi yang sangat besar di masa depan, ini disebabkan karena Indonesia memiliki luas lautan yaitu 62% dari luas wilayah nasional, dan belum termasuk zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE seluas 2,7 Juta Km².

Pemanfaatan ruang terbentuk karena adanya daya tarik kegiatan yang muncul sehingga menimbulkan *multiplier effect* terhadap pembangunan yang lainnya. Misalkan, karena adanya kegiatan ekonomi dengan basis perikanan di wilayah pesisir akan menimbulkan pembangunan permukiman di kawasan pesisir pantai. Hal ini disebabkan karena nelayan mempertimbangkan lokasi bekerja untuk mencari ikan di laut. Atau wilayah pesisir yang dijadikan sebagai kawasan strategis pariwisata yang akan memunculkan kegiatan ekonomi baru seperti berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa.

Ruang terbangun atau sumber daya buatan terdiri dari unit ruang *private* yaitu bangunan dengan kaplingnya (sebagai *cell*) dan ruang publik berupa jaringan jalan dan ruang terbuka (sebagai *network*). Wilayah pesisir merupakan wilayah *human settlement*, tempat manusia tinggal, bekerja dengan segala kehidupannya. Pesisir merupakan wilayah yang strategis bagi perkembangan permukiman perkotaan dan pusat desa-desa nelayan, sebagai tempat produksi seperti industri, pusat terminal transportasi laut (pelabuhan). Kehidupan manusia ini yang menciptakan ruang-ruang terbangun yang akhirnya sering menciptakan masalah di dalam ekosistem pantai.

Kota Padang merupakan kota memiliki potensi pantai, ini terlihat dari kondisi geografisnya yaitu memiliki panjang pantai yaitu 68 km dan memiliki objek wisata pantai yang beragam. Wilayah pesisir kota padang saat ini di dominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman kepadatan sedang hingga tinggi serta menjadi kawasan pariwisata. Permasalahan ruang terbangun di wilayah pesisir Kota Padang saat ini antara lain pembangunan yang kurang memperhatikan sempadan pantai, sempadan pantai saat ini digunakan untuk jalan. Hal ini dapat memicu tingginya aktivitas manusia dalam pemanfaatan ruang, sehingga menimbulkan permasalahan seperti sampah, kondisi prasarana drainase yang memburuk, abrasi, degradasi ekosistem pantai. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara memiliki pantai yang landai dengan tinggi ombak mencapai 2 meter. Sehingga terjadinya abrasi sangat tinggi. Kondisi saat ini sempadan pantai dibangun pemecah ombak guna menahan hantaman ombak ke daratan.

A. Tinjauan Pustaka

Dalam RTRW Kota Padang 2010-2030 Wilayah penelitian yang merupakan wilayah pesisir Kota Padang merupakan Kawasan Strategis Sepanjang Pantai Padang karena memiliki nilai potensi untuk pengembangan berbagai kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, terutama kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepariwisataan.

Kawasan sepanjang pantai Padang ini dalam RTRW Kota Padang yaitu menjadi prioritas penataan ruang dengan 2 alasan :

1. Sepanjang pantai Padang merupakan kawasan yang rawan terhadap bahaya gelombang pasang dan tsunami
2. Sepanjang pantai Padang dikembangkan jalan yang berfungsi sebagai tanggul untuk menahan gelombang, namun dengan adanya jalan justru menjadi penarik pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014-2019 Visi jangka menengah Kota Padang adalah “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”

Dari visi tersebut dapat dilihat bahwa ada 5 hal pokok arah pembangunan Kota Padang yaitu :

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan perdagangan serta
3. Meningkatkan sektor pariwisata
4. Meningkatkan aspek religius dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki moral yang tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat

5. Tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan budaya lokal yaitu Budaya Minangkabau. Dari visi misi yang telah dijelaskan diatas mengingat Kota Padang secara struktur ruang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) maka sasaran umum pembangunan Kota Padang mencakup 4 hal pokok yang masing-masingnya saling berkaitan yaitu :

1. Terwujudnya Kota Padang yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik (Service Center) dengan kegiatan utama meliputi pendidikan, dan kesehatan untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah serta pusat pemerintahan untuk Provinsi Sumatera Barat.
2. Terciptanya Kota Padang yang juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan (Growth Pole) dengan kegiatan utama ditekankan pada bidang perdagangan, jasa dan pariwisata untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah.
3. Terlaksananya Kota Padang sebagai kota layak huni yang mempunyai prasarana dan sarana yang cukup dan berkualitas baik serta lingkungan hidup yang menyenangkan dan bebas dari kemungkinan bencana alam.
4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Dalam visi tersebut, pemerintah diyakini mampu menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan serta memiliki sektor pariwisata yang baik untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta diyakini mampu menjaga lingkungan hidup dan memiliki prasarana dan sarana yang baik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi lapangan dengan penyebaran kuisioner, dan pemetaan. Metode sampling yang digunakan yaitu metode Slovin dengan batas toleransi kesalahan yaitu sebesar 10% sehingga dari 53.533 jiwa diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Metode pemetaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Ground Checking* dengan peta dasar Citra Satelit *Google Earth* tahun 2017. Pada penelitian ini juga menggunakan metode Skala Likert untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap prasarana dan sarana di wilayah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

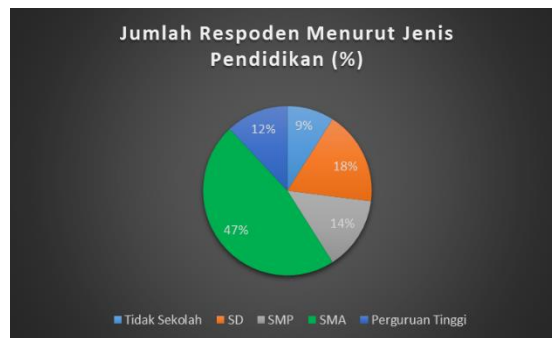
A. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.



Gambar 1. Jumlah responden menurut pendapatan

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa karakteristik responden yang berada di wilayah penelitian lebih banyak berpenghasilan Rp. 500.000 – 1.500.000 per bulan yaitu sebanyak 69%.

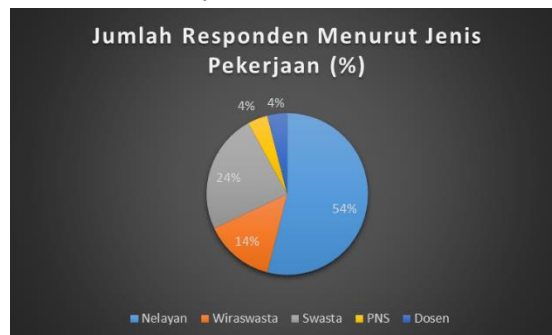
B. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.



Gambar 2. Jumlah responden menurut pendidikan

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa karakteristik responden menurut jenis pendidikan diperoleh yaitu pendidikan SMA 47%, SD 18%, SMP 14%, Perguruan Tinggi 12% dan Tidak Sekolah sebanyak 9%.

C. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan



Gambar 3. Jumlah responden menurut pekerjaan

Berdasarkan karakteristik responden yang dilihat dari jenis pekerjaan, dapat dilihat bahwa pekerjaan sebagai Nelayan lebih mendominasi di wilayah penelitian yaitu sebesar 54%

D. Sosial Ekonomi, Demografi

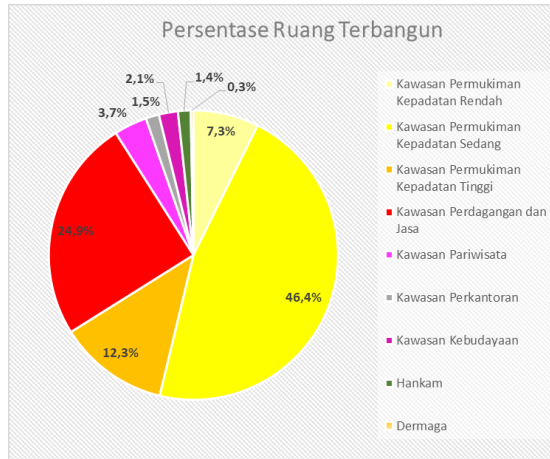
Berdasarkan survey yang dilakukan dari 100 responden terdapat 69 orang memiliki penghasilan Rp. 500.000 – 1.500.000, 20 orang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000 – 2.500.000, 11 orang memiliki penghasilan Rp. 2.500.000 – 3.500.000. artinya wilayah penelitian didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika dilihat dari data Demografis pada bab sebelumnya, jumlah penduduk terbanyak yaitu berada di Kelurahan Ulak Karang Selatan yaitu 9.153 jiwa dengan laju pertumbuhan 15,64% dari tahun 2014-2016. Di posisi kedua adalah Kelurahan Purus yaitu 8.075 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,51%. Kedua kelurahan tersebut memiliki permukiman dengan kepadatan sedang hingga tinggi.

Dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang ada di wilayah penelitian maka dapat diasumsikan bahwa, dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan ruang terbangun seperti permukiman baru menjadi bertambah dan perdagangan dan jasa pun juga akan bertambah serta kebutuhan akan sarana dan prasarana. Dengan bertambahnya kebutuhan ruang tetapi mereka memiliki keterbatasan terhadap ekonomi serta keterbatasan pengetahuan, maka masyarakat yang berada di wilayah pesisir membangun rumah seadanya. Hal ini akan berdampak yaitu menimbulkan seperti *Slum Area*, dan dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti limbah rumah tangga yang mengalir ke sungai hingga muara. Jika diperhatikan dari kondisi prasarana yang ada di wilayah penelitian dalam kondisi buruk.

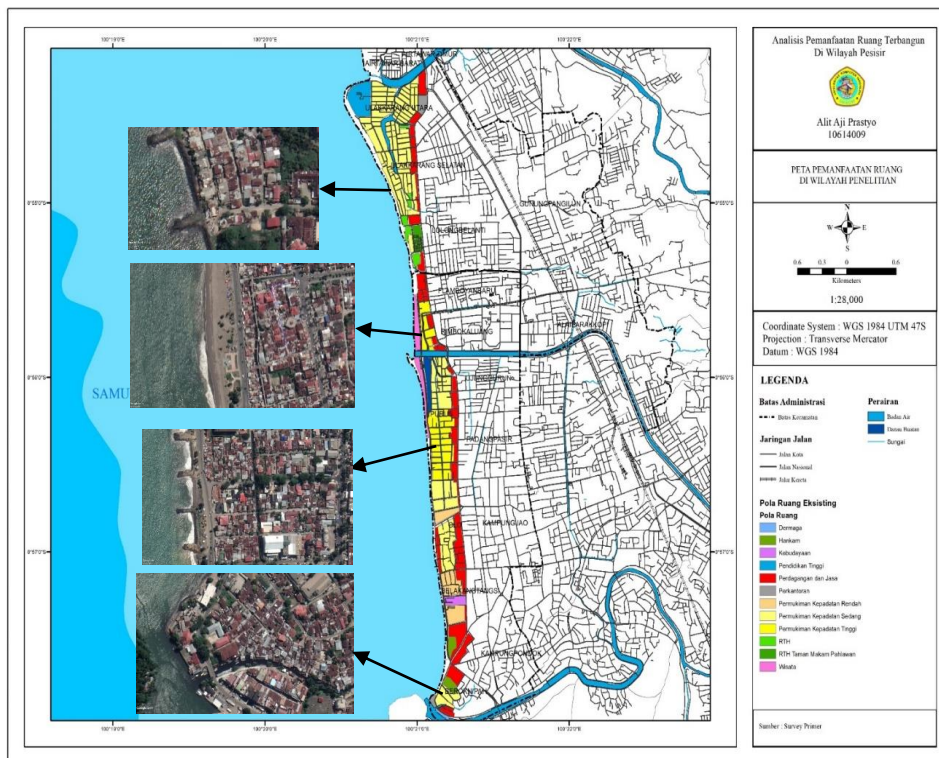
E. Pemanfaatan Ruang Terbangun

Survey pemetaan dilakukan menggunakan koordinat sistem DATUM WGS 1984 UTM 47S. metode yang digunakan adalah *Ground Checking* dengan peta dasar Citra Satelit Google Earth 2017.



Gambar 4. Persentase ruang terbangun

Berdasarkan hasil survey pemetaan yang dilakukan, maka diperoleh proporsi ruang terbangun di wilayah penelitian. Terlihat bahwa kawasan permukiman kepadatan sedang mendominasi yaitu sebesar 46,4% dan diposisi kedua adalah Kawasan Perdagangan dan Jasa yaitu 24,9% dan diposisi ketiga adalah kawasan permukiman kepadatan tinggi yaitu 12,3%. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada peta dibawah ini :



Gambar 5. Peta Pemanfaatan Ruang Terbangun Di Wilayah Studi

F. Sarana Prasarana

Analisis ini bertujuan untuk melihat kebutuhan fasilitas di wilayah penelitian apakah sudah tercukupi atau belum pada jumlah penduduk tahun 2016 dengan merujuk kepada standar SNI tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Untuk sarana pendidikan dan sarana kesehatan merujuk kepada SNI – 03 – 1733 – 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1) Sarana Pendidikan

TABEL I.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN MENURUT KECAMATAN, 2016

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
Kecamatan Padang Barat	22	39	12	20
Kecamatan Padang Utara	26	33	10	12

TABEL II.
JUMLAH KEBUTUHAN SARANA PENDIDIKAN MENURUT KECAMATAN

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
Kecamatan Padang Barat	36	28	9	9
Kecamatan Padang Utara	60	47	15	15

Perlu adanya penambahan untuk Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara. Untuk SD, SMP dan SMA perlu adanya penambahan di Kecamatan Padang Utara..

2) Sarana Kesehatan

TABEL III
JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KECAMATAN, 2016

Kecamatan	Puskesmas	Pustu	Toko Obat/Apotik	Posyandu
Kecamatan Padang Barat	1	5	17	65
Kecamatan Padang Utara	3	4	17	82

TABEL IV
KEBUTUHAN SARANA KESEHATAN MENURUT KECAMATAN, 2016

Kecamatan	Puskesmas	Pustu	Toko Obat/Apotik	Posyandu
Kecamatan Padang Barat	1	1	1	36
Kecamatan Padang Utara	2	2	2	61

3) Drainase

Analisis ini berdasarkan kepada pengambilan sampel responden dari masyarakat di Wilayah Penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap prasarana drainase dan limbah. Responden diambil secara acak atau *Random Sampling* berjumlah 100 Orang. Berikut adalah hasil dari responden dengan menggunakan Skala Likert.

Rumus Skala Likert adalah sebagai berikut :

$$T \times P_n$$

T = Total jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor likert

Rumus Indeks % = Total Skor / Y x 100

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden

Bobot Skor tertinggi adalah 4 (Sangat Baik) dan bobot terendah adalah 1 (Buruk) maka, interval penilaiannya adalah sebagai berikut :

- Interpretasi Skor 0% - 24,99% Buruk
- Interpretasi Skor 25% - 49,99% Cukup
- Interpretasi Skor 50% - 74,99% Baik
- Interpretasi Skor 75% - 100% Sangat Baik

TABEL V.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI DRAINASE

Kriteria	Skor	Responden	Skor x Responden
Sangat Baik	4	0	0
Baik	3	0	0
Cukup	2	31	62
Buruk	1	69	69
Total			131
Interpretasi Skor			32,75%

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat dari interpretasi skor yaitu 32,75% hasil ini berarti masyarakat memiliki persepsi terhadap kondisi drainase yaitu cukup. Tetapi angka ini belum sepenuhnya menuju arah baik jika dilihat dari responden sebanyak 69 dari 100 orang yang mengatakan buruk. Jadi hasil persepsi masyarakat dapat disimpulkan bahwa kondisi drainase yang ada di wilayah penelitian cukup tapi membutuhkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas. Dan berdasarkan survey lapangan kondisi drainase yang ada di wilayah penelitian menggunakan sistem *On Street* dan berada dibawah permukaan.

4) Limbah

TABEL VI
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI LIMBAH

Kriteria	Skor	Responden	Skor x Responden
Sangat Baik	4	0	0
Baik	3	0	0
Cukup Baik	2	25	50
Buruk	1	75	75
Total			125
Interpretasi Skor			31,25%

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan interpretasi skor di atas yaitu sebesar 31,25% dapat disimpulkan bahwa kondisi limbah yang ada di wilayah penelitian adalah Cukup. Jika dilihat dari jumlah responden yang memilih maka, kondisi limbah yang ada di wilayah penelitian membutuhkan peningkatan kualitas.

5) Angkutan Umum

TABEL VII
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI ANGKUTAN UMUM

Kriteria	Skor	Responden	Skor x Responden
Sangat Baik	4	0	0
Baik	3	65	195
Cukup Baik	2	35	70
Buruk	1	0	0

Total	265
Interpretasi Skor	66,25%

Berdasarkan hasil analisis diperoleh interpretasi skor yaitu 66,25% artinya kondisi angkutan umum di wilayah penelitian dapat dikatakan Baik. Hal ini disebabkan tersedianya beberapa pilihan moda angkutan umum dimulai dari angkutan kota atau angkot, Bus TransPadang dan Angkutan Online.

Aksesibilitas

TABEL VIII
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP AKSES BEKERJA

Kriteria	Skor	Responden	Skor x Responden
Sangat Mudah	4	12	48
Mudah	3	88	264
Cukup Mudah	2	0	0
Sulit	1	0	0
Total Skor			312
Interpretasi Skor			78%

TABEL IX
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP AKSES KE SEKOLAH

Kriteria	Skor	Responden	Skor x Responden
Sangat Mudah	4	77	308
Mudah	3	23	69
Cukup Mudah	2	0	0
Sulit	1	0	0
Total Skor			377
Interpretasi Skor			94%

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa interpretasi skor Akses Bekerja menunjukkan angka 78% dan Akses Ke Sekolah yaitu 94% jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas adalah Sangat Mudah. Kemudahan aksesibilitas ini juga dapat dilihat dari analisis sebelumnya yang menunjukkan kecukupan jangkauan pelayanan dari prasarana pendidikan, kesehatan serta Kondisi Angkutan Umum yang baik.

G. Potensi Dan Permasalahan

Analisis ini bertujuan untuk melihat potensi serta permasalahan yang nantinya akan dijadikan sebuah gagasan untuk pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pesisir Kota Padang serta dapat dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut. Potensi dan permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL X
POTENSI, PERMASALAHAN DAN PENGEMBANGAN

Potensi	Permasalahan	Pengembangan
<ul style="list-style-type: none"> Sektor perdagangan dan jasa memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Padang Perkembangan wisatawan setiap tahunnya meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya pedagang yang berjualan di sempadan pantai yaitu di Belakang Tangsi, dan Olo. Masih kurangnya atraksi baru yang berada di Sepanjang Pantai. Saat ini atraksi wisata pantai berada di Purus dan Rimbo Kaluang 	<ul style="list-style-type: none"> Relokasi atau penyediaan fasilitas seperti LPC (Lapau Panjang Cimpago) baru bagi pedagang agar lebih tertata. Membuat atraksi baru yang berada di Olo dan Belakang Tangsi. agar dapat meningkatkan sektor pariwisata dan perdagangan dan jasa.

Potensi	Permasalahan	Pengembangan
<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan daya tarik pemanfaatan ruang terbangun seperti kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman baru Tingginya pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir Atraksi wisata baru yang di sepanjang pantai Padang bagian barat. 	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi prasarana drainase dan limbah memiliki kondisi yang buruk. Drainase yang buruk menyebabkan genangan air hingga banjir. Permukiman yang membelakangi laut dan berada dekat dengan laut menimbulkan permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah. Tingginya pemanfaatan ruang terbangun di sempadan pantai. Kurangnya ekosistem yang dapat mempertahankan garis sempadan pantai 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas prasarana drainase serta pengelolaannya. Peningkatan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga Penataan dan peningkatan pengendalian lingkungan perumahan yang berada di sempadan pantai Kecamatan Padang Utara Pengendalian pemanfaatan ruang terbangun terhadap sempadan pantai. Penambahan ekosistem pantai seperti pohon cemara udang dan Katang yang dapat mempertahankan ekosistem pantai serta meredam abrasi.

KESIMPULAN

- Berdasarkan tinjauan kebijakan yakni melalui RTRW, RPJMD, dan RDTR, Wilayah studi diarahkan sebagai kawasan strategis perekonomian yang didalamnya terdapat kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan wisata.
- Merupakan kawasan prioritas yaitu sempadan pantai dan kawasan wisata dengan tema pengembangan yaitu penataan dan pelestarian serta pengembangan pengendali ombak laut.
- Berdasarkan hasil survey primer diperoleh potensi dan permasalahan yaitu, dari sektor ekonomi wilayah penelitian berpotensi untuk dikembangkan kawasan wisata dan perdagangan dan jasa, permasalahannya yaitu pedagang yang masih berjualan di sempadan pantai. Ruang terbangun di sempadan pantai sangat tinggi, sehingga menimbulkan degradasi ekosistem pantai serta limbah yang mengalir ke muara laut. Permukiman yang ada di Kecamatan Padang Utara masih banyak yang membelakangi pantai dan memiliki jarak yang sangat dekat dengan laut. Prasarana drainase dan limbah di wilayah penelitian masuk kedalam kategori cukup. Akan tetapi jika dilihat dari pilihan responden banyak yang mengatakan kondisinya buruk. Wilayah penelitian juga berpotensi dikembangkannya atraksi wisata baru.
- Berdasarkan hasil survey pemetaan yang dilakukan diperoleh hasil persentase pemanfaatan ruang terbangun di wilayah studi yaitu 46,4% kawasan permukiman kepadatan sedang, 24,9% kawasan perdagangan dan jasa, 12,3% kawasan permukiman kepadatan tinggi, 7,3% kawasan permukiman kepadatan rendah, 3,7% kawasan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- [2] Soetomo, Sugiono. 2005. *Sistem Pembangunan Hunian Masyarakat Di Wilayah Pesisir*. Aceh Besar
- [3] Dahuri, Rokhmin,dkk. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- [4] Sriyono. 2012. "Geo Permukiman". Bahan presentasi yang dipublikasikan. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.
- [5] Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Padang Barat Dalam Angka 2017*.
- [6] Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Padang Utara Dalam Angka 2017*.
- [7] Badan Standar Nasional Indonesia. SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
- [8] Peraturan Presiden Republik Indonesia No 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai
- [9] Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfa Beta : Bandung.
- [10] UU Republik Indonesia No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.